

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menjadi salah satu dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan posisi yang menggiurkan bagi sejumlah kalangan yang mempunyai kepentingan tertentu. Betapa tidak, menjadi salah satu bagian dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih maka secara otomatis akan mempunyai suatu otoritas atau kewenangan yang besar.

Sebagai contoh pada saat *event* Pemilu (pemilihan umum) diselenggarakan, apabila masing-masing anggota KPU tersebut diberikan otoritas atau kewenangan untuk menentukan jumlah daerah tempat pemilihan atau jumlah orang yang dapat mewakili satu daerah pemilihan tertentu. Maka semua keputusan-keputusan yang diambil tersebut jelas-jelas dapat merugikan atau bahkan akan dapat menguntungkan tentunya bagi partai-partai politik tertentu yang mempunyai kepentingan secara personal. Oleh karena itu, dengan kata lain siapapun yang hendak mengincar posisi misalnya menjadi Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD atau DPD, akan sangat tergantung kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk juga orang-orang yang berada didalamnya.

Sejak tanggal 31 Juli 2007, Tim Seleksi Calon Anggota KPU mulai menyeleksi siapa-siapa saja para calon anggota KPU yang akan terpilih. Sebagai

tertulis. Tahap seleksi selanjutnya yaitu mengadakan tes rekam jejak. Dari 180 orang lebih yang dinyatakan lolos tes tertulis, diambil 45 orang yang diurutkan menurut rekam jejaknya mulai yang tertinggi sampai dengan terendah. (http://www.kompas.com/kompas_cetak/0710/02/opini/3965626.htm, akses 13 November 2007)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian telah memilih siapa-siapa saja yang berhak menjadi anggota KPU periode 2007-2012. Mereka adalah para anggota-anggota terpilih setelah Komisi II DPR melakukan *voting* (pemungutan suara) untuk membuat ranking dari hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Hasil *voting* tersebut kemudian dibuat peringkat, 7 peringkat pertama otomatis menjadi anggota KPU terpilih. Sedangkan nomor urut 8 hingga 20 disiapkan untuk mengisi kekosongan apabila ada anggota yang berhalangan tetap seperti dikarenakan adanya putusan pengadilan atau meninggal dunia.

Tujuh orang peringkat pertama dan sekaligus menjadi anggota KPU terpilih tersebut, adalah Abdul Hafiz Anshary (43 suara), Sri Nuryanti (42 suara), Endang Sulastri (40 suara), I Gusti Putu Artha (37 suara), Syamsul Bahri (36 suara), Andi Nurpati (29 suara), dan Abdul Aziz (27 suara). Kemudian, urutan kandidat-kandidat lain yang akan menjadi calon anggota KPU apabila terdapat anggota KPU yang berhalangan tetap yaitu Saut Hamonangan Sirait (21 suara), M. Ja'far (20 suara), Elvyani N.H. Gaffar (10 suara), Laurel Heydir (8 suara), Zulfadli (8 suara), Hamdan Rasyid (5 suara), Achmad Herry (5 suara), Ridwan Max Sijabat (3 suara), dan M. Mossadeq (2 suara). Sementara itu, calon kandidat Dyah Arum Munanggar, Nasaruddin Harahap, Roba'i Hamid, dan Toemin A. Masoem tidak mendapatkan suara. Sedangkan calon kandidat Theofilus Waimuri dinyatakan gugur terlebih dahulu dikarenakan pernah menjabat calon legislatif. (<http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=145045>, akses 19 November 2007)

Salah satu dari 7 anggota KPU terpilih yang lolos dari tes uji kelayakan

Namun, meloloskannya membawa masalah panjang. Karena ketika mencalonkan diri menjadi anggota KPU, dirinya tersangkut masalah dugaan korupsi dana Pabrik Gula Proyek Kawasan Industri Perkebunan Masyarakat (Kigumas), Kabupaten Malang senilai Rp 1,1 miliar dan berstatus tersangka. Kigumas sendiri adalah program pemberdayaan masyarakat tebu untuk rakyat. Kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,1 miliar tersebut, dari nilai total Rp 3,032 miliar sekitar Rp 645.987.000 dikorupsi Syamsul. Padahal uang tersebut sebagai jasa LPM Unibraw yang menjadi konsultan pembangunan. Posisi Syamsul di Unibraw, menjabat sebagai Guru Besar serta Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (LPM Unibraw) Malang.

Kasus ini berawal tahun 2004 dan diketahui lima orang tersangka. Lima tersangka tersebut adalah Ahmad Santoso (mantan Sekretaris Daerah), Samian (Direktur CV Sami Jaya), Samiadi (Direktur CV Technical Utama), Hendro Soesanto (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Malang), dan Freddy Talahatu (anggota staf Dinas Pertanian dan Perkebunan). Semua tanggung jawab LPM Unibraw dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Prof. Syamsul Bahri, semua tanggung jawab tersebut tidak sedikitpun menyimpang dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. *(Tempo, Berkas Syamsul Bahri ke Pengadilan, Rabu 21 November 2007)*

Dasar dari kerjasama Unibraw dengan Pemkab Malang adalah Piagam Kerjasama No. 0501486/429.201/2001 tanggal 26 April 2001 tentang kerjasama Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang ditandatangani Bupati Malang Mochamad Ibnu Rubianto dengan Rektor Unibraw Prof.Dr.H. Eka Afnan Troena, SE. Operasionalisasi kerjasama dalam bidang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis

berdasarkan Surat Tugas Rektor Unibraw No. 2252/J10/LL/2001. Keterkaitan LPM Unibraw berdasarkan dua Surat perjanjian yaitu, Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (kontrak) jasa konsultan pengadaan pabrik (pabrikasi), serta Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan dalam (kontrak) jasa konsultan pembangunan gedung dan sumur bor Pabrik Gula Kigumas seluas 11.450 m² yang terletak di Desa Ganjaran, Gondanglegi, Malang.

Perjanjian selanjutnya tertuang dalam Surat No. 525/388/KONTRAK/429.117/2003. Kedua kontrak tersebut diadendum sebagai berikut: Adendum Kontrak No. 05/2203 pada tanggal 9 Agustus 2003 terhadap Kontrak No. 525/388/KONTRAK/429.117/2003 pada tanggal 10 Maret 2003. Adendum Kontrak No. 06/2003 pada tanggal 9 Agustus 2003 terhadap Kontrak No. 525/390/KONTRAK/429.117/2003 pada tanggal 10 Maret 2003, tentang Perubahan Tugas Pekerjaan, Jangka Waktu, Biaya, serta Cara Pembayaran Pekerjaan. Atas jasanya tersebut, LPM Unibraw menerima biaya pekerjaan senilai Rp 645.987.000. Uang tersebut ditransfer ke rekening LPM Unibraw di Bank Jawa Timur Malang dengan No. 0041023222 pada tanggal 4 Maret 2004. Dana tersebut dituding sebagai hasil dari korupsi. Padahal, dana tersebut adalah merupakan uang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan PG Kigumas yang berakhir tanggal 30 September 2003. (*FORUM Keadilan, edisi No. 28/12-18 November 2007, hal. 34-35*)

Akibat kasus tersebut, Presiden hanya melantik enam anggota KPU terpilih dan tidak melantik Syamsul. Tidak dilantiknya salah seorang anggota KPU bermasalah menimbulkan silang pendapat antara anggota DPR dan Pemerintah. Namun, Presiden tetap akan menunggu akhir proses hukum Syamsul. Kasus seorang anggota KPU yang lolos seleksi tetapi mempunyai masalah hukum telah menyulitkan posisi Presiden. Sebab, Presiden tidak dapat menonaktifkan yang bersangkutan dari keanggotaan di KPU karena belum resmi menjadi anggota KPU dan Syamsul juga belum dilantik.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Idrus Marham (FP Golkar), penggantian Syamsul Bahri belum layak dilakukan karena status tersangka sehingga harus menunggu kekuatan hukum tetap. *Pertama*, merujuk pada UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa seorang anggota KPU gugur keanggotaannya jika telah mendapat vonis tetap dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. *Kedua*, dipertanyakannya

tersebut terhenti selama dua tahun, dikhawatirkan ada tendensi lain dan terkesan upaya pencitraan negatif yang dialamatkan atas nama hukum. Menurutnya, mekanisme penggantian Syamsul dapat ditempuh dengan cara kocok ulang. Mekanisme ini ditempuh agar tetap menghasilkan anggota yang tetap kredibel dan berkualitas. (*Majalah FORUM Keadilan, edisi No. 28/12-18 November 2007, hal. 76*)

Pendapat lain dari pengamat politik, Arbi Sanit. Ada atau tidak status hukumnya di pengadilan, Syamsul layak diganti. *Pertama*, menjaga integritas dan kejujuran mekanisme pemilu agar menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih baik. *Kedua*, jangan sampai karena menunggu putusan status hukum Syamsul kinerja KPU menjadi macet. *Ketiga*, Syamsul melakukan kebohongan publik saat *fit and proper test* berlangsung. Sebagai seorang yang harus menjamin kejujuran pemilu, tetapi tidak mempunyai integritas dan tidak pantas masuk dalam dunia kekuasaan. Menurutnya, penggantian Syamsul dilakukan dengan mengambil nomor urut kedelapan dari nama-nama yang diajukan tim seleksi pemilu, atau enam orang anggota KPU yang dilantik. (*Majalah FORUM Keadilan, edisi No. 28/12-18 November 2007, hal. 77*)

Ketika kontroversi terus merebak, yang menjadi masalah bukan terletak kepada individu Syamsul Bahri, melainkan mekanisme dan sistem yang luar biasa ketat untuk menjangkit anggota KPU yang ternyata meloloskan seorang tersangka kasus korupsi. Mekanisme dan sistem yang dibuat Tim Seleksi KPU tersebut miskin validitas dan reabilitas akademis, bahkan menonjolkan nepotisme sehingga menghasilkan output yang mengundang polemik. Saling lempar tanggung jawab seakan-akan menegaskan setiap pihak baik Pemerintah maupun Komisi II DPR ingin membersihkan diri, tetapi tidak juga mengambil langkah yang signifikan.

Upaya pembelaan dilakukan tim penasihat hukum Syamsul Bahri dan tim dari Fakultas Hukum Unibraw tempat Syamsul bernaung. Mereka berkeyakinan bahwa kliennya tidak bersalah dan tidak terkait dengan kasus korupsi seperti yang dituduhkan kepadanya. Tim rektorat Unibraw menyerahkan dokumen pembelaan

Pengabdian Masyarakat (LPM) pimpinan Syamsul Bahri dalam dugaan penyertaan konsultan perencanaan serta pengawasan pembangunan Pabrik Gula Kigumas. Dalam salinan tersebut tuntutan jaksa, sejumlah proyek yang dikerjakan LPM Unibraw bersifat fiktif. Padahal, Pemkab Malang tetap membayar proyek tersebut. Selain itu menunjukkan sejumlah bukti proyek yang telah dilaksanakan yaitu, berita acara serah terima pekerjaan dan penyerahan foto-foto pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan konsultan pada tanggal 31 Oktober 2003, serta terdapat 17 *item* sipil.

Menurut penasihat hukum Syamsul, Haris Fajar, penahanan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam KUHP. Diantaranya, upaya menghilangkan atau merusak barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan serupa. "Bagaimana mau menghilangkan barang bukti, semua berkas dan data sudah disita. Apalagi melarikan diri. Pak Syamsul muncul berkiprah di level nasional sebagai calon anggota KPU. Terus, bagaimana bisa mengulangi perbuatannya? *Wong* proyeknya sudah selesai." (*Jawa Pos, Syamsul Bahri Dipertahankan, Kamis 8 November 2007*)

Menindaklanjuti hal tersebut, terjadi semacam polemik dan perdebatan panjang serta adu argumentasi, mengenai apakah Syamsul Bahri perlu diganti atau tidak. Yang menjadi pertimbangan adalah selain dalam Keputusan Presiden (Kepres) penundaan pelantikan Syamsul atas permintaan sendiri, juga dihadapkan dengan persoalan hukum yang belum mencapai final. Kemudian timbul penilaian dikarenakan hingga kini belum ada pelantikan secara resmi, sesuai perundang-undangan yang ada posisinya tidak bisa langsung dibatalkan maupun digantikan oleh calon KPU yang lainnya. Kecuali jika sudah dilantik, maka bisa langsung diberhentikan sebagai anggota KPU. Hingga muncul dua alternatif mekanisme, yaitu Syamsul otomatis akan digantikan oleh calon nomor urut kedelapan atau

Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo* adalah contoh dari adanya perbedaan sudut pandang media dalam melihat dan menyajikan realitas ke dalam bentuk berita. Kedua media massa tersebut memiliki komposisi pemberitaan yang berlainan dan mempunyai cara tersendiri dalam membingkai dan mengkonstruksi suatu pemberitaan mengenai polemik pemilihan Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU terpilih, dalam kaitannya statusnya sebagai tersangka kasus korupsi.

Berikut ini beberapa berita yang diturunkan oleh masing-masing media massa tersebut:

**Tabel 1.1: Berita *Jawa Pos*
Tentang Polemik Syamsul Bahri sebagai Anggota KPU Terpilih**

Tanggal	Judul Berita
8 November 2007	Syamsul Bahri Dipertahankan
22 November 2007	Idrus: Janggal Penahanan Syamsul

Sumber: Surat Kabar Harian *Jawa Pos*, yang disusun kembali oleh peneliti.

**Tabel 1.2: Berita *Tempo*
Tentang Polemik Syamsul Bahri sebagai Anggota KPU Terpilih**

Tanggal	Judul Berita
3 November 2007	Kejaksaan Tahan Syamsul Bahri
10 November 2007	Posisi Syamsul Bahri Akan Diisi Orang Lain

Sumber: Koran *Tempo*, yang disusun kembali oleh peneliti.

Dengan melihat latar belakang dari Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dengan Syamsul Bahri, yaitu adanya keterkaitan kedaerahan. Surat Kabar Harian *Jawa Pos* yang menjalankan segala aktivitas kegiatannya berpusat di Surabaya-Jawa Timur. Sedangkan tokoh yang bermasalah adalah Syamsul Bahri yang merupakan

salah satu tokoh yang berasal dari Jawa Timur sekaligus menjabat sebagai Guru Besar Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (LPM Unibraw) Malang. Dalam hal pemberitaan suatu peristiwa atau realitas pasti sedikit maupun banyak berpengaruh terhadap artikel yang disajikan. Sedangkan Koran *Tempo* jelas-jelas cenderung menjadi bagian dari media yang beroposisi. Permasalahan yang pernah dialami *Tempo* adalah pembredelan pada masa Orde Baru. Dalam menyajikan berita secara kritis yang mengakibatkan sering mendapat masalah dengan pemerintah, para penguasa, dan para pengusaha. Orang-orang dalam Koran *Tempo* dikenal karena pembangkangannya terhadap rezim Orde Baru. Sangat anti terhadap komunis, anti terhadap tirani politik, apalagi menyangkut permasalahan korupsi di lingkungan pemerintahan, dan sebagainya.

Adanya perbedaan pandangan antara Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo* terhadap kasus polemik terpilihnya Syamsul Bahri sebagai salah satu dari ketujuh anggota KPU terpilih, menyebabkan hasil pemberitaan yang disajikan akan berbeda pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pandang masing-masing media terhadap berita yang dihasilkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian bagi penulis adalah: “Bagaimana Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo* periode November 2007 dalam membingkai

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo* periode November 2007 dalam mengemas pemberitaan seputar kasus polemik Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU terpilih.
- 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo* periode November 2007 seputar polemik Kasus Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU terpilih.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a) Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu komunikasi dalam kajian analisis media khususnya pada metode analisis framing. Serta dapat mengetahui ideologi masing-masing media dan bagaimana masing-masing media dalam membingkai berita tersebut.

b) Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan khalayak dapat memahami realitas yang dibentuk oleh media. Selain itu, dapat secara kritis menyeleksi berbagai pemberitaan yang disampaikan oleh media, sehingga tidak begitu saja

E. KERANGKA TEORI

E.1. Pandangan Konstruksionis

Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Realitas dalam kehidupan sosial bukanlah sesungguhnya realitas yang dialami, tetapi merupakan hasil dari konstruksionis. Oleh karenanya, yang menjadi konsentrasi paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa/realitas tersebut dikonstruksi dengan dengan cara apa konstruksi tersebut dibentuk.

Framing pada dasarnya digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media. Dalam studi komunikasi menurut John Fiske dalam bukunya *Introduction to Communication Studies*, dalam melihat suatu realitas/peristiwa dapat dipahami dengan dua cara, yaitu: *pertama*, komunikasi sebagai proses transmisi pesan (pandangan Positivistik) dan *kedua*, komunikasi dilihat sebagai proses produksi pesan dan pertukaran makna (pandangan Konstruksionis).

"The structure of this book reflects the fact that there are two main schools in the study of communication. The first sees communication as the transmission of messages. It concerned with how senders and receivers encode and decode ..., the second school sees communication as the production and exchange of meanings. It is concerned with how messages, or texts, interact with people in our culture". (Fiske, 1990:2)

(Struktur buku ini mencerminkan sebuah fakta-fakta bahwa ada dua paradigma besar dalam Ilmu Komunikasi. Pertama, komunikasi dipandang sebagai proses transmisi atau pengiriman pesan. Hal ini ditekankan pada bagaimana pengirim pesan mengirimkan pesan dan penerima pesan menerima pesan ..., yang kedua, Ilmu komunikasi dipandang sebagai produksi dan pertukaran makna. Hal ini ditekankan pada bagaimana pesan-pesan atau teks-teks berinteraksi dengan khalayak agar dapat

Dalam pandangan ini, Fiske melihat bahwa suatu realitas dapat dipahami melalui dua cara pandang yang berbeda, dan dari pandangan ini akan melahirkan dua paradigma besar dalam ilmu komunikasi. Pertama, paradigma yang melihat komunikasi sebagai proses transmisi pesan (pandangan positivisme), yang menitikberatkan pada proses berlangsungnya pesan dari pengirim (*komunikator*) hingga sampai kepada penerima (*komunikan*) melalui *transmitter*. Kedua, paradigma yang melihat komunikasi sebagai proses produksi pesan dan pertukaran makna (pandangan konstruksionisme), yang menitikberatkan bagaimana pesan diciptakan oleh pengirim (*komunikator*) dan bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh individu penerima (*komunikan*).

Secara umum model komunikasi transmisi selalu menyertakan pengirim (*sender*), penerima pesan (*komunikan*) dan lewat medium melalui mana pesan-pesan dikirimkan. Gangguan (*noise*) adalah sesuatu yang terjadi di antara pengiriman tersebut. Dalam konteks media cetak, media adalah percetakan yang menghasilkan suatu surat kabar atau media cetak, pengirim pesan (*sender*) adalah wartawan atau editor dan penerima pesan (*komunikan*) adalah pesan setiap individu yang membaca media cetak tersebut. Sedangkan gangguan (*noise*) terjadi di antara proses tersebut, gangguan tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh tulisan yang tidak dapat dibaca maupun penulisan sumber berita yang salah.

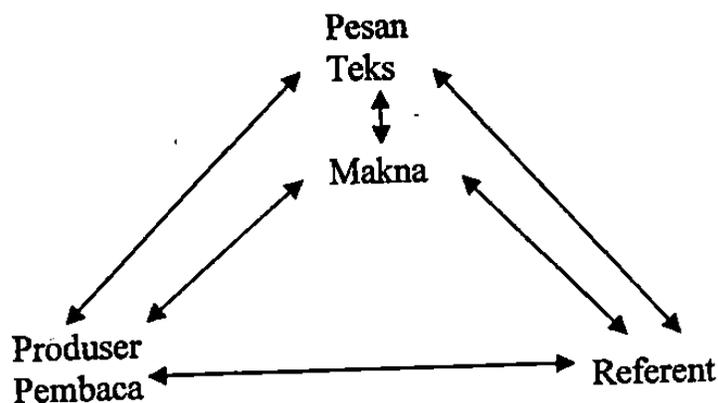
Lewin dan Slade menggambarkan proses komunikasi tersebut terlihat *mekanistik* dan *simplistik*. Ketika komunikasi berlangsung individu yang mengirim sandi (*code*) dan proses komunikasi pada dasarnya adalah proses penyandian pesan agar dapat diterima dan dipahami oleh individu penerima. Sedangkan proses menerima pesan pada dasarnya adalah proses mengurai sandi (*decode*) dan menyandi ulang agar dapat diterima sesuai

Dalam proses penyampaiannya, pesan selalu dipengaruhi oleh faktor realitas di luar pesan tersebut. Penyampaian pesan merupakan praktek yang dinamis, tidak hanya dipahami sebagai sebuah pesan yang disampaikan dari A ke B saja. Pesan tidak dilihat sebagai paralel atau linier semata, tetapi pesan tersebut sudah dinamis, dimana terdapat pengaruh lain yang membuat pemahaman tentang pesan menjadi beragam. Maksud pengiriman pesan mungkin diberitahukan atau tidak diberitahukan, sadar atau tidak sadar, tetapi harus diberitahukan dari analisa.

“The message, then, is not something sent from A to B, but an element in a structured relationship whose other elements include external reality and the producer/reader. Producing and reading the text are seen as parallel, if not identical, processes in that they occupy the same place in this structured relationship. We might model this structure as a triangle in which the arrows represent constant interaction; the structure is not static but a dynamic practice”. (Fiske, 1990:3-4)

(Pesan, dengan demikian bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B, tetapi sebagai bagian dalam struktur hubungan diantara lain realitas luar dan pembuat/pembaca. Membuat dan membaca diantara teks tidak semata secara paralel, jika tidak serupa, proses itu menempati tempat yang sama dalam struktur hubungan. Kita dapat lihat model hubungan ini sebagai segitiga dimana anak panah menunjukkan interaksi yang konstan hubungan ini tidak statis tapi sebuah praktek yang dinamis).

Gambar 1.1: Pesan dan Makna



Pandangan konstruksionis lebih melihat bahwa komunikasi merupakan proses produksi pesan dan pertukaran makna. Memfokuskan bagaimana pesan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh individu penerima. Terdapat dua karakteristik dari pendekatan konstruksionis menurut Crigler, yaitu:

Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. (Eriyanto, 2002:40-41)

Menurut Guba dan Lincoln, pandangan konstruktivisme dalam paradigma ilmu sosial dipaparkan bahwa realitas/fakta merupakan konstruksi atas realitas dan kebenaran atas suatu realitas/fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh aktor sosial. (Salim, 2006:77)

Pemikiran konstruksionis memandang suatu kejadian (realitas) tidak hadir dengan sendirinya secara objektif, tetapi diketahui atau dipahami melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh bahasa. Realitas dipahami melalui bahasa secara situasional yang tumbuh dari interaksi sosial dalam suatu kelompok sosial pada saat dan tempat tertentu. Suatu realitas atau peristiwa dapat dipahami dan ditentukan oleh konvensi-konvensi komunikasi terhadap realitas yang tersusun secara sosial yang membentuk aspek penting dari kehidupan.

(<http://blogaryandi.wordpress.com/2007/12/22/politisasi-bahasa-sebagai->

Untuk membedakan antara paradigma positivis dan paradigma konstruksionis, para ahli membuat dikotomi antara dua paradigma tersebut. Dibawah ini penulis merangkum perbedaan antara paradigma positivis dan paradigma konstruksionis dalam tabel berikut:

Tabel 1.3: Perbedaan Paradigma Positivis dan Paradigma Konstruksionis

Positivis	Konstruksionis
1. Ada fakta riil yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal.	1. Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku dalam konteks tertentu.
2. Media sebagai saluran pesan.	2. Media sebagai agen konstruksi pesan.
3. Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. Karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput.	3. Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.
4. Berita bersifat objektif: Menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pembuat berita.	4. Berita bersifat subjektif: Opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.
5. Wartawan sebagai pelapor.	5. Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keanekaragaman subjektifitas pelaku sosial.
6. Nilai, etika, opini dan pilihan moral berada diluar proses peliputan berita.	6. Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu berita.
7. Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada diluar proses penelitian.	7. Nilai, etika, dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian.
8. Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat berita.	8. Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita.
9. Tujuan penelitian: eksplanasi, prediksi, dan kontrol.	9. Tujuan penelitian: rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku sosial yang diteliti.
10. Peneliti berperan sebagai <i>disinterested scientist</i> .	10. Peneliti berperan sebagai <i>passionate participant</i> , fasilitator yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial.

secara inheren nada dalam teks, dan ditransmisikan kepada pembaca.	proses saling mempengaruhi antara teks dan pembaca. Makna bukan ditransmisikan, tetapi dinegosiasikan.
12. Dualis: Ada realitas objektif, sebagai suatu realitas yang eksternal di luar peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek penelitian.	12. Transaksionalis: Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.
13. Objektif: Analisis teks tidak boleh menyertakan penafsiran atau opini peneliti.	13. Subjektif: Penafsiran bagian tidak terpisahkan dari penelitian teks. Bahkan dasar dari analisis teks.
14. Intervensional: Pengajuan hipotesis dalam struktur <i>hipotetico-deductive method</i> : melalui lab eksperimen atau survei eksplanatif, dengan analisis kuantitatif.	14. Reflektif/dialektik: Menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti-teks untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif.
15. Kriteria kualitas penelitian: Objektif, validitas, dan reliabilitas (internal dan eksternal).	15. Kriteria kualitas penelitian: Otentisitas dan reflektivitas; sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh para pelaku sosial.

Sumber: Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (2002:20-63)

E.2. Realitas Sosial dan Ideologi Media

E.2.1. Konstruksi Realitas Sosial

Konsep konstruksi sosial atas realitas diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Dalam tesis utamanya yaitu manusia dan masyarakat merupakan produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Berger mengatakan pula bahwa masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. (Eriyanto, 2002:13)

Realitas menurut Berger tidak terbentuk secara ilmiah, maupun sesuatu yang diturunkan begitu saja. Tetapi sebaliknya, realitas dibentuk dan dikonstruksi.

Selanjutnya, manusia mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, maka

wajar jika seseorang masing-masing akan menafsirkan realitas sesuai kerangka berpikir (*frame of reference*) dan kerangka pengalamannya (*frame of experience*).

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial dikonstruksi melalui proses dengan tiga tahapan yaitu:

Eksternalisasi (penyesuaian diri), yaitu setiap individu atau pelaku sosial akan memaknai setiap realitas secara berbeda. Pandangan subyektif terhadap sebuah realitas dapat berbeda-beda karena masing-masing individu dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Sedangkan *Objektivasi*, yaitu proses interaksi dan sosialisasi makna subyektif setiap individu terhadap makna subyektif. Hasil dari proses eksternalisasi individu tersebut menghasilkan realitas subyektif. Proses ini merupakan bentuk konkret dari internalisasi disertai catatan bahwa hasil objektivasi tersebut berlaku secara umum. Sedangkan *Internalisasi*, adalah proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. (Eriyanto, 2002:14-15)

Eriyanto melihat realitas yang tersaji dalam media menurut pendekatan konstruksionis adalah suatu realitas subyektif yang terbentuk lewat pemahaman dan pemaknaan subyektif dari wartawan. Wartawan di lapangan memiliki keleluasaan dalam membentuk dan memproduksi realitas. Sehingga kenyataan yang tersaji dalam melakukan peliputan berita di lapangan tergantung pada subyektifitas wartawan.

Dalam konteks media cetak, terdapat tiga tindakan dalam mengkonstruksi realitas, yang hasil akhirnya berpengaruh pada pembentukan suatu realitas yaitu:

Pertama, pemilihan kata atau simbol. Sekalipun media cetak hanya melaporkan, tetapi jika pemilihan kata, istilah atau simbol yang secara konvensional memiliki arti tertentu di tengah masyarakat, tentu akan mengusik perhatian masyarakat tersebut. *Kedua*, pembingkaiannya suatu peristiwa, pada media cetak selalu ada tuntutan teknis, seperti keterbatasan-keterbatasan kolom dan halaman. Jarang media membuat berita tentang peristiwa secara utuh dari menit pertama kejadian hingga akhir. Atas nama kaidah jurnalistik, berita selalu disederhanakan melalui

untuk diterbitkan. *Ketiga*, penyediaan ruang. Semakin besar ruang yang diberikan, semakin besar pula perhatian yang akan diberikan oleh khalayak. (Sudibyo, 2001:2-4)

Media cetak mempunyai pengaruh yang besar dalam mendefinisikan suatu realitas. Bagaimana wartawan membingkai realitas atau peristiwa dengan pilihan-pilihan kata akan mempengaruhi bagaimana fakta yang ditampilkan wartawan tersebut dapat dipahami dan dimaknai. Oleh karena itu, bagaimana media cetak memaknai suatu realitas atau peristiwa yang diangkat menjadi seperangkat fakta yang dikemas menjadi berita.

Bagaimana mendefinisikan realitas tergantung bagaimana subyektifnya wartawan dalam meliput di lapangan. Pendefinisian tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana wartawan memandang peristiwa yang terjadi, bagaimana pemilihan kata yang dipakai, pilihan gambar atau foto yang akan memperkuat prasangka khalayak terhadap suatu peristiwa yang akan diliput. Kemudian bagaimana pemilihan sumber yang akan memperkuat dalam suatu peristiwa.

Proses pemilihan fakta tidak terlepas dari bagaimana media cetak memaknai berita atau peristiwa tersebut. Wartawan-lah yang mempunyai andil besar dalam pemilihan peristiwa dan nara sumber yang kemudian dituangkan dalam bentuk berita. Peristiwa yang sama mungkin saja disajikan secara berbeda antara wartawan satu dengan wartawan yang lain, hal ini disebabkan karena realitas dipahami secara berbeda-beda pula.

E.2.2. Pendefinisian Realitas Suatu Media

Sebuah berita tidak sama persis dengan apa yang terjadi di lapangan.

sebagai proses menulis realitas sesuai dengan realitas sebenarnya (*mirror of reality*), akan tetapi berita yang dimuat telah melalui berbagai proses dan telah dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dennis McQuail dalam bukunya *McQuail Mass Communication Theory 4th Edition*, menguraikan beberapa tahapan perkembangan media massa yaitu:

Pertama, adanya buku dan perpustakaan. Perkembangan buku dan perpustakaan memberi awal baru bagi perkembangan media massa. *Kedua*, adanya media cetak dalam bentuk koran. Koran mampu menyajikan informasi terkini secara cepat dan instan, koran juga menempatkan diri sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk kepentingan ekonomi secara luas. *Ketiga*, penemuan film melalui pita seluloid. Dalam perspektif baru melihat bahwa film bukan hanya sebuah mekanisme hiburan, tetapi sebagai sebuah media massa yang mampu menjangkau khalayak yang lebih luas. *Keempat*, penemuan teknologi penyiaran melalui media televisi dan radio. Dalam cakupan luas, teknologi audio visual, pelibatan teknologi dan organisasi media yang lebih kompleks serta isi semakin beragam. Media penyiaran mampu menjangkau khalayak yang lebih luas. *Kelima*, perkembangan rekaman musik. Berawal dari bentuk phonogram, kemudian beralih ke pita kaset dan sekarang didominasi cakram digital. *Keenam*, penemuan internet yang memungkinkan interkoneksi di antara pemakainya. Bukan lagi berfungsi semata-mata bersifat publik, tetapi dapat bersifat privat, dengan ditopang dengan teknologi berbasis komputer (*computer-based technologies*). (Junaedi, 2007:27-29)

Dari bermacam-macam peristiwa didunia setiap harinya, tidak semua berita dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese mengidentifikasi lima faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan redaksi untuk mengambil suatu keputusan dalam ruang pemberitaan, yaitu: (Sudiby, 2001:7-10)

- 1) *Level Individual*. Pada level ini mencakup latar belakang personal

kelamin, dan sikap individu terhadap suatu peristiwa. Wartawan memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak penentuan isi berita.

2) *Level Rutinitas Media (media routine)*. Aktivitas memproduksi berita adalah merupakan rutinitas dalam sebuah institusi media. Dalam standar media cetak, proses penyeleksian isu akan ditampilkan lebih berlapis. Mulai dari peliputan yang dilakukan oleh wartawan di lapangan, kemudian dalam proses *editing*, pada proses akhir redaktur berperan penuh dalam pengolahan berita.

3) *Level Organisasi*. Pada level ini berhubungan dengan struktur organisasi dalam mempengaruhi pemberitaan. Kebijakan organisasi media juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses penyaringan berita. Kebijakan media tersebut akan mengarahkan media pada tujuan tertentu sesuai dengan tujuan media tersebut berdiri.

4) *Level Ekstra Media*. Suatu institusi media sangat ditentukan oleh corak masing-masing lingkungan eksternal media. Misalnya, pemerintahan yang masih bersifat otoriter akan lebih mudah mendominasi media dalam menentukan berita yang layak disajikan kepada publik. Mereka akan membuat aturan-aturan ketat yang akan memberikan batasan-batasan kepada industri media, sehingga pemberitaan nantinya sangat sarat akan kepentingan penguasa.

Pertama, Sumber Berita. Sumber berita tidak dilihat sebagai pihak yang netral dalam memberikan informasi berita apa adanya. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita akan memberlakukan politik pemberitaan. Hal ini akan memberikan informasi yang baik bagi dirinya, dan mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. *Kedua, Sumber Penghasil Media*. Untuk

bertahan hidup kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Misalnya media tertentu tidak akan memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan pengiklan. *Ketiga, Pihak Eksternal Media.* Seperti Pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Misalnya dalam negara otoriter, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita yang disajikan. Karena negara menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan. *Keempat, Level Ideologi.* Sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana cara menghadapinya. Pada level ini akan lebih dilihat kepada berkuasa di masyarakat dan bagaimana media menentukan. (Sudibyo, 2001:10-12)

Media massa menjadi sebagai tolok ukur masyarakat dalam melihat realitas yang terjadi, karena keberadaannya banyak mempengaruhi opini publik terhadap peristiwa yang terjadi. Apa yang disajikan media massa baik menyangkut sudut pandang dalam melihat realitas, sikap media massa terhadap sebuah realitas dianggap penting atau tidak sebuah realitas melalui pemberitaannya terhadap realitas yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi opini publik dalam menyikapi realitas tersebut. Sedangkan opini publik terhadap realitas akan selalu beragam menurut ideologi wartawan maupun media massa, dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam tubuh media massa itu sendiri.

E.2.3. Ideologi Suatu Media

Ideologi dapat diartikan sebagai kerangka pikir yang digunakan oleh setiap individu untuk melihat realitas dan bagaimana individu tersebut menghadapinya. Ideologi adalah suatu konsep abstrak, yang berhubungan dengan konsepsi individu dalam menafsirkan suatu realitas. Ideologi yang abstrak diartikan sebagai

... yang menentukan bagaimana media tersebut akan

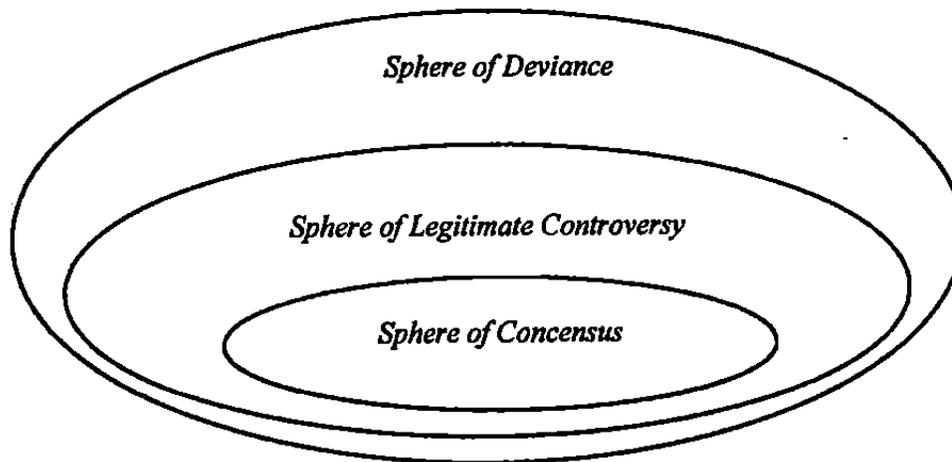
dipahami oleh publik. Ideologi menurut arti kata adalah pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan dari yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran. (Sukarna, 1981:1)

Pandangan Magnis-Suseno tentang ideologi adalah dianggap sebagai kesadaran palsu, sistem berfikir yang sudah terkena distorsi, baik disadari maupun tidak disadari. Biasanya ideologi sekaligus dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan secara tidak wajar. (Sobur, 2001:66)

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan ideologi, menurut Louis Althusser, terlebih dahulu diperkenalkan apa yang terkandung didalamnya yaitu *Ideological State Apparatus (ISA)* dan *Repressive State Apparatus (RSA)*. ISA menjalankan fungsinya secara ideologi (*by ideology*), sedangkan RSA menjalankan fungsinya melalui kekerasan (*by violence*). Definisi ideologi Althusser yaitu: *pertama*, ideologi mempresentasikan secara imajiner relasi antara individu-individu dengan kondisi eksistensinya yang nyata. *Kedua*, ideologi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sebuah gagasan, tetapi memiliki keberadaannya secara material. (Junaedi, 2007:46-48)

Ideologi tidak selalu harus dikaitkan dengan ide-ide besar, ideologi juga bisa bermakna politik penandaan atau pemaknaan. Bagaimana kita melihat peristiwa dengan kacamata dan pandangan tertentu, dalam arti luas adalah sebuah ideologi. Sebab dalam proses melihat dan menandakan peristiwa tersebut kita menggunakan titik melihat tertentu, titik atau posisi melihat tersebut menggambarkan bagaimana peristiwa dijelaskan dalam kerangka berpikir tertentu. (Eriyanto, 2002:130)

Gambar 1.2: Peta Ideologi



Sumber: Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (2002:127)

Dalam bidang *pertama* yaitu penyimpangan (*sphere of deviance*), memberikan gambaran dimana suatu peristiwa, perilaku atau gagasan disepakati secara umum dalam masyarakat sebagai sebuah tindakan yang dipandang buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Bidang *kedua* adalah kontroversi (*sphere of legitimate controversy*). Kontroversi melihat suatu realitas masih diperdebatkan atau dipandang kontroversial. Ketika sesuatu permasalahan masih diperdebatkan atau tidak serta merta dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang, dalam bidang ini justru diperdebatkan. Sedangkan bidang *ketiga* yaitu konsensus (*sphere of consensus*). Konsensus menunjukkan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok.

Dalam kaitannya bagaimana isi media dapat menjelaskan suatu realitas, Dennis McQuail memberikan pendekatan yaitu teori ekonomi-politik media (*political economy media theory*). Pendekatan ini berpijak pada pengertian

relasi kekuasaan, baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya (*resources*). Teori ini menganggap bahwa kepemilikan media, pada segelintir elit pengusaha telah menyebabkan patologi atau penyakit sosial. (Junaedi, 2007:34)

Pertama, pertumbuhan konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir orang saja. Menganggap sebuah konsentrasi kepemilikan media yang menyebabkan semakin sedikitnya lembaga yang memiliki media. Hal tersebut dapat menyebabkan informasi yang disebarkan media dengan mudah dikendalikan oleh segelintir orang saja. *Kedua*, terjadi konglomerasi media dimana sebuah perusahaan media melebarkan sayapnya dengan membangun berbagai industri media yang berbeda lini. *Ketiga*, terjadinya perkembangan global di bidang ekonomi-informasi (*information economy*) yang melibatkan bisnis telekomunikasi, penyiaran dan terutama film. *Keempat*, turunnya peran sektor publik di dalam media massa dan juga merosotnya kontrol publik dalam telekomunikasi melalui paket kebijakan deregulasi, privatisasi dan liberalisasi. *Kelima*, terjadinya kepemilikan silang (*cross ownership*) yang semakin mendominasi pasar. (Junaedi, 2007: 35-39)

Dalam area ideologis, bidang-bidang tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan realitas yang sama dapat dijelaskan secara berbeda, tentunya dengan memakai kerangka yang berbeda-beda pula.

Dengan melihat latar belakang dari Surat Kabar Harian *Jawa Pos* yang berpusat di Surabaya-Jawa Timur, sedangkan sosok Syamsul Bahri merupakan tokoh dari Jawa Timur yang juga sekaligus menjabat sebagai Guru Besar Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (LPM Unibraw) Malang. Sedikit banyak pemberitaan yang diangkat mengenai polemik Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU terpilih, akan sangat berpengaruh. Sedangkan Koran *Tempo*, dalam menyajikan berita cenderung anti terhadap komunis, anti terhadap tirani politik, apalagi menyangkut permasalahan korupsi (KKN). Cenderung lebih kritis dan berani sehingga penekanan beritanya lebih tajam.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai sikap keberpihakan terhadap lembaga atau partai politik

tertentu, Koran *Tempo* sering melakukan kritikan-kritikan tajam serta pendapatnya sering bersebrangan dengan Pemerintah. Misalnya dari pemilihan judul pemberitaan dan nara sumber yang diambil, cenderung bersikap kontra dalam hal ini polemik terpilihnya Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU.

E.3. Pandangan Publik tentang Konsep Framing

Konsep framing dapat menawarkan suatu alternatif kepada paradigma yang menyimpang dan objektivitas yang telah populer dalam riset mengenai komunikasi massa selama bertahun-tahun. Peneliti perlu menggeser fokus mereka dari studi penyimpangan dan objektivitas kepada studi ideologi dalam berita. Konsep framing merupakan suatu pendekatan yang bermanfaat sebab berpotensi dalam membongkar dan membuka atau menampakkan asumsi yang tersembunyi.

Mulanya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan framing sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. (Sobur, 2001:161-162)

Berikut ini beberapa teori framing dilihat dari pandangan para ahli:

Tabel 1.4: Framing Menurut Pandangan Publik

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah

	kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow and Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhodang Pan and Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber: Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (2002:67-68)

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif tersebut pada akhirnya yang menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999:21)

Framing pada dasarnya adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atau peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita, cara melihat berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas sosial. "Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi

Realitas yang sama dapat diberitakan berbeda oleh media, seperti kasus yang diangkat yaitu polemik terpilihnya Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU dalam kaitannya menjadi tersangka dalam kasus korupsi Dana Pabrik Gula Kigumas, Kabupaten Malang. Ada media yang memberitakan bahwa Syamsul Bahri tetap harus dilantik menjadi salah satu anggota KPU terpilih. Tetapi ada juga media yang memberitakan bahwa Syamsul Bahri segera di-*recall* (ditarik) dalam keanggotaan KPU karena statusnya sebagai tersangka kasus korupsi Dana Proyek Kawasan Industri Perkebunan Masyarakat (Kigumas).

Kedua berita tersebut dari satu peristiwa yang sama akan tetapi berita yang ditampilkan berbeda, perbedaan tersebut terjadi karena peristiwa tersebut dipahami dan dikonstruksi secara berbeda oleh media. Terdapat dua esensi utama dari framing, yaitu: *Pertama*, bagaimana peristiwa dimaknai, berhubungan dengan apa yang diliput dan apa yang tidak diliput. *Kedua*, bagaimana fakta ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemaknaan kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. (Eriyanto, 2002:10)

E.4. Analisis Framing Model Robert N. Entman

Robert N. Entman merupakan salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* yang digunakan untuk studi isi media.

Konsep *framing* menurut Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dilakukan oleh media. Isu atau realitas diseleksi dan ditonjolkan sebagai cara untuk memframing wacana media. Framing dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang

Seleksi dan penonjolan isu membuat suatu informasi menjadi lebih terlihat, lebih mudah menarik perhatian, dan lebih mudah diingat khalayak. Kondisi ini menyebabkan suatu isu yang disampaikan lebih mudah diterima khalayak yang juga dapat mempengaruhi mereka.

Entman menawarkan perangkat-perangkat *framing*, yang pertama yaitu melihat framing dalam dua dimensi besar: *seleksi isu* dan *penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu*. Pekerja media menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, kemudian menonjolkan aspek-aspek pada isu yang dipilih tadi menggunakan berbagai strategi penyusunan wacana. Aspek-aspek ditonjolkan untuk menarik minat sehingga wacana yang dihasilkan bermakna dan diingat oleh khalayak media. *Framing* dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara pandang dan perspektif media yang akan terlihat dari seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Tidak semua aspek dari realitas atau peristiwa ditampilkan tetapi terdapat hanya satu atau beberapa aspek tertentu saja. Suatu bagian dalam peristiwa akan ditonjolkan dan bagian lain yang diabaikan atau hilang dalam wacana media. Penonjolan isu menyangkut penulisan peristiwa ke dalam wacana, bagaimana peristiwa tersebut ditampilkan. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. (Eriyanto, 2002:186-187)

Konsepsi *framing* menurut Entman, pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana

diwacanakan. *Framing* dilakukan dengan melakukan empat hal tersebut terhadap realitas yang akan dimunculkan dalam wacana media. Entman melihat elemen-elemen framing yang kedua, terdiri dari empat elemen yaitu:

Tabel 1.5: Elemen-Elemen Framing Menurut Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (2002:188-189)

Pertama, Define Problem atau *Problem Identification* (*pendefinisian masalah*). Merupakan elemen pertama kali yang akan ditemui ketika melihat/mencermati framing dalam suatu media massa. Menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika peristiwa/realitas tersebut dipahami secara berbeda-beda oleh setiap orang. *Kedua, Diagnose Causes* atau *Causal Interpretation* (*memperkirakan penyebab masalah*). Merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Suatu peristiwa atau masalah dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga dipahami secara berbeda pula. *Ketiga, Make Moral Judgement* (*membuat pilihan moral*). Merupakan elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Ketika realitas/masalah telah didefinisikan, penyebab masalah telah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. *Keempat, Treatment Recommendation* (*menekankan penyelesaian*). Digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

peristiwa/masalah tersebut dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto, 2002:189-191)

Seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek dari realitas yang diimplementasikan dalam empat elemen di atas, akan sangat menentukan hasil rekonstruksi realitas yang dilakukan oleh media. Ketika peristiwa/realitas didefinisikan tertentu, maka seperti itulah definisi realitas yang muncul di hadapan khalayak. Khalayak akan berpikir bahwa inilah realitas yang sedang terjadi. Penyebab masalah dan pilihan moral yang diberikan, akan memberi gambaran pada khalayak tentang siapa dan bagaimana penyebab masalah yang terjadi.

F. METODOLOGI PENELITIAN

F.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai “jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan bentuk-bentuk hitungan lainnya dari kuantifikasi/pengukuran”. (Strauss&Corbin, 2003:2)

Menggunakan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2001:3). Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

Peristiwa/berita merupakan sesuatu yang dikonstruksi dari realitas, begitu pula dengan berita Syamsul Bahri sebagai anggota KPU terpilih yang cukup mendapat banyak perhatian dari banyak pihak. Paradigma konstruksionis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data diperoleh secara kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah berita yang dimuat pada Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo*.

Analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan konstruksi yang dilakukan media (berita Syamsul Bahri sebagai anggota KPU terpilih) salah satunya adalah dengan analisis framing. Analisis framing merupakan analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana realitas dikonstruksi dan dibentuk oleh media, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media, dalam hal ini bagaimana wartawan maupun institusi media mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca.

F.2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini menggunakan dua surat kabar nasional. SKH *Jawa Pos* dan Koran *Tempo* periode November 2007 yang menurunkan berita mengenai polemik pemilihan anggota KPU terpilih Syamsul Bahri, dalam kaitan status tersangka kasus korupsi. Yang mendasari pemilihan kedua media massa

Tabel 1.6: Berita *Jawa Pos*

Tentang Polemik Syamsul Bahri sebagai Anggota KPU Terpilih

Tanggal	Judul Berita
8 November 2007	Syamsul Bahri Dipertahankan
22 November 2007	Idrus: Janggal Penahanan Syamsul

Sumber: Surat Kabar Harian *Jawa Pos*, yang disusun kembali oleh peneliti.

Tabel 1.7: Berita *Tempo*

Tentang Polemik Syamsul Bahri sebagai Anggota KPU Terpilih

Tanggal	Judul Berita
3 November 2007	Kejaksaaan Tahan Syamsul Bahri
10 November 2007	Posisi Syamsul Bahri Akan Diisi Orang Lain

Sumber: Koran *Tempo*, yang disusun kembali oleh peneliti.

F.3. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan: mempelajari dokumen-dokumen Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo* periode November 2007, yang mengangkat berita mengenai polemik kasus Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU terpilih dalam kaitannya kasus korupsi Dana Proyek Kawasan Industri Perkebunan Masyarakat (Pabrik Gula Kigumas).

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui penelitian studi pustaka terhadap bahan-bahan yang berhubungan dengan analisis

Sumber: Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data yang diperoleh

dari literatur seperti: buku, majalah, *website*, maupun dari berbagai surat kabar atau tulisan-tulisan yang dianggap menunjang topik permasalahan dalam penelitian.

F.4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing*, sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana suatu realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media, sehingga hasil akhir yang tampak adalah adanya penonjolan realitas dan aspek-aspek tertentu yang mudah dikenal.

Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu peristiwa. Disini media menseleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. (Eriyanto, 2002:67)

Dalam kaitannya kasus polemik terpilihnya Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota KPU serta kasus korupsi yang menyangkut dirinya, maka dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Entman memandang *framing* sebagai proses seleksi dan berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa tersebut lebih menonjol dibanding aspek yang lain. Analisis *framing* model ini juga menempatkan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Entman menawarkan perangkat-perangkat *framing*, yang *pertama* melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan/penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Yang *kedua*, elemen-

identification, diagnose causes/causal interpretation, make moral judgement / moral evaluation, dan treatment recommendation.

Elemen *framing* yang pertama adalah *define problems* (pendefinisian masalah), elemen pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh wartawan, bagaimana peristiwa atau isu dapat dipahami secara berbeda. Kedua, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah) yaitu digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai penyebab atau sumber masalah. Sumber masalah disebut juga sebagai pelaku, sehingga dapat diketahui siapa pelaku siapa korban. Ketiga, *make moral judgement* (membuat pilihan moral) yaitu digunakan untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah telah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Keempat, *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) yaitu digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Apa yang dikehendaki oleh wartawan untuk menyelesaikan masalah/isu. Penyelesaian tersebut sangat tergantung pada bagaimana peristiwa dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto, 2002:189-191)

Entman melihat framing sebagai seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari suatu isu dengan empat cara pendefinisian media dalam menafsirkan peristiwa. Empat cara pendefinisian media dalam menafsirkan peristiwa. Empat cara pendefinisian yang ditawarkan oleh Entman, sesuai dengan tujuan penelitian. *Problem identification* digunakan untuk melihat bagaimana proses pemilihan anggota KPU yang memilih Syamsul Bahri sebagai anggota terpilih. Dalam kaitannya kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya, proses selanjutnya apakah tetap dilantik sebagai anggota KPU atau dicopot/di-*recall* dari keanggotaan KPU. *Causal interpretation* digunakan untuk melihat masalah tersebut yang disebabkan oleh apa atau siapa. Dalam hal ini apakah Syamsul memang terbukti melakukan korupsi atau hanya untuk mencemarkan nama baiknya saja. *Moral evaluation* menunjukkan penilaian apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak dan

tindakan apa yang harus dilakukan dalam menanggapi masalah tersebut. Apakah memang layak dilantik menjadi salah satu anggota KPU terpilih dan tidak terbukti bersalah atau malah sebaliknya. *Treatment recommendation* melihat saran apa yang diberikan terhadap masalah tersebut. Dengan menunggu proses yang sedang berjalan di pengadilan dengan memutuskan status Syamsul Bahri.

F.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam empat bab dan disertai dengan beberapa sub bab. Dimana Bab I menjelaskan tentang bagaimana munculnya polemik dalam pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Munculnya polemik tersebut bermula dari terpilihnya Syamsul Bahri sebagai salah satu anggota terpilih KPU, serta status tersangka yang dituduhkan kepadanya. Yaitu kasus korupsi dana Proyek Kawasan Industri Perkebunan Masyarakat (Kigumas) senilai milyaran rupiah yang menyeret namanya. Analisis *framing* adalah perangkat teori yang diperlukan oleh peneliti untuk membedah pemberitaan disetiap media massa. Dengan menggunakan teori *framing* model Robert N. Entman, akan diketahui bagaimana suatu media membangun sebuah konstruksi peristiwa yang kemudian berkembang menjadi sebuah wacana ditengah masyarakat.

Pada Bab II peneliti menjelaskan profil media yang menjadi objek penelitian yaitu Surat Kabar Harian *Jawa Pos* dan Koran *Tempo*, mulai dari sejarah berdiri hingga perkembangannya saat ini. Kemudian pada Bab III menjelaskan analisa data yang bahannya diperoleh dari kedua media cetak

tersebut berupa berita-berita yang dimuat selama kasus pemilihan anggota KPU terpilih Syamsul Bahri sedang hangat diberitakan. Pada analisa ini, peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk menggambarkan proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dilakukan oleh media.

Skripsi ini diakhiri pada Bab IV yang terangkum dalam kesimpulan dan saran. Sub Bab kesimpulan, skripsi ini menjelaskan hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti. Kemudian pada sub Bab saran, peneliti berusaha memberikan alternatif penilaian kepada media tersebut dan pembaca skripsi dalam melihat serta menilai suatu pemberitaan yang dimuat. Skripsi ini menyertakan beberapa